

BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Hasil penelitian terhadap penilaian kuisisioner SWOT oleh para responden yang dianggap ahli, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

Faktor Kekuatan

Faktor Kekuatan (*Strength*) utama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah:

1. Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian;
2. Posisi geografis Kabupaten Klaten yang berada diantara daerah-daerah lain yang sudah maju dan memiliki berbagai fasilitas yang sifatnya nasional maupun internasional;
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Klaten;

Faktor Kelemahan

Faktor Kelemahan (*Weakness*) utama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD Kabupaten Klaten;
2. Kurangnya upaya sosialisasi potensi daerah Kabupaten Klaten kepada pihak luar;
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah yang dinilai masih kurang.

Faktor Peluang

Faktor Peluang (*Opportunity*) yang utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM;

2. Berbagai program pemerintah pusat;
3. Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah;

Faktor Ancaman

Faktor Ancaman (*Threat*) yang utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah:

1. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)
2. Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia;
3. Kurangnya investasi swasta di Kabupaten Klaten.

Alternatif Strategi

Berdasarkan hasil pembobotan terhadap kuisisioner SWOT, maka usulan strategi alternatif yang dapat direkomendasikan adalah Strategi *Strength – Opportunity (SO)*, yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan alternatif strategi sebagai berikut:

1. Dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat dalam bentuk transfer, pemerintah daerah dapat memanfaatkan modal dasar yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten, seperti kondisi geografis yang menguntungkan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, potensi sumber daya alam, serta sarana dan prasarana dasar yang telah tersedia, untuk memaksimalkan pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka meningkatkan PAD dan pembangunan daerah Kabupaten Klaten;
2. Dengan tersedianya sarana dan prasarana perekonomian yang dimiliki Kabupaten Klaten, pemerintah dapat memanfaatkan etos kerja, keuletan, dan jiwa kewirausahaan masyarakat di sektor perekonomian mikro untuk semakin memperkuat perekonomian melalui industri kecil, UMKM, dan koperasi, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas;

3. Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan menjadikan Kabupaten Klaten daerah wisata, karena selain memiliki potensi wisata yang cukup baik, kondisi sosial dan politik di Kabupaten Klaten juga cukup kondusif untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata, sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan teknologi yang semakin berkembang sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualitas unggul, serta memanfaatkan kerja sama dengan daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Klaten.

Prioritas Kebijakan Pembangunan

Prioritas kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ekonomi mikro;
2. Memanfaatkan segala sumber daya untuk mengoptimalkan otonomi daerah;
3. Memperbaiki kinerja lembaga;
4. Mengembangkan potensi wisata yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Klaten.
5. Mempertahankan Kabupaten Klaten sebagai daerah pertanian/lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah;

Prioritas kebijakan ini sangat mungkin berubah, terutama apabila terjadi hal-hal yang diluar rencana. Apabila skenario yang paling realistis adalah skenario status quo, maka sasaran yang harus dicapai adalah mengurangi kemiskinan, dengan prioritas kebijakan yang harus diambil adalah mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan apabila skenario yang dianggap paling realistis adalah skenario pesimis, maka sasaran yang harus dicapai adalah meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kebijakan mengoptimalkan sumber daya.

6.2. Saran

Saran yang bisa disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten membuat prioritas pembangunan yang lebih memperhatikan keberadaan dan keberlanjutan industri kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang di ada di lingkungan Kabupaten Klaten, karena bagaimanapun UMKM memberikan sumbangan yang cukup besar pada struktur perekonomian. UMKM yang dimaksud disini bukan hanya dari jenis kerajinan atau industri pengolahan, tapi juga termasuk UMKM yang berbasis pertanian, karena pada dasarnya Kabupaten Klaten memiliki potensi di sektor pertanian;
- Menyempurnakan berbagai infrastruktur yang mendukung sektor pertanian (seperti perbaikan irigasi dan aplikasi tehnologi) dan sektor pariwisata, apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ingin menjadikan kedua sektor tersebut sebagai sektor unggulan.

Sedangkan saran yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menambahkan responden yang lebih variatif, misalnya dengan menambahkan para pelaku usaha/pelaku perekonomian.

6.3. Keterbatasan Studi

Keterbatasan studi yang dilakukan tidak lepas dari penggunaan metode yang digunakan, yaitu:

- Metode Analisis SWOT

Metode analisis SWOT memiliki beberapa kelemahan, antara lain cenderung melihat permasalahan dari satu sudut pandang, yaitu yang dijadikan *stake holder* utama. Pada penelitian ini, *stake holder* utamanya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kelemahan lainnya adalah data yang dihasilkan sangat tergantung terhadap penilaian responden. Dampaknya adalah belum tentu semua responden memberikan penilaian yang obyektif terhadap

permasalahan yang disampaikan, sehingga subyektifitas penilaian sulit untuk dikontrol. Selain itu, penentuan responden juga menjadi kelemahan, karena tidak ada jaminan responden yang dipilih benar-benar mewakili institusi atau kelompoknya.

- Metode AHP

Penggunaan metode AHP juga memiliki kelemahan. model AHP tidak luput dari beberapa kelemahan yang dapat berakibat fatal. Ketergantungan model ini pada input berupa persepsi seorang *expert* akan membuat hasil akhir dari model ini menjadi tidak ada artinya apabila *expert* memberikan penilaian yang keliru. Kondisi ini ditambah dengan belum adanya kriteria yang jelas untuk seorang *expert*, membuat orang sering ragu-ragu dalam menanggapi solusi yang dihasilkan model ini.

- Penggunaan kuisioner

Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen kuisioner, idealnya dilakukan dengan pendampingan dari peneliti, sehingga apabila terjadi salah persepsi dapat segera ditanyakan kepada peneliti. Namun dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan berbagai permasalahan yang ditemui penulis dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perlu dijelaskan bahwa seluruh pengisian kuisioner dalam penelitian ini dilakukan tanpa pendampingan dari penulis.

6.4. Penutup

Terlepas dari segala kelemahan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pembandingan bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk melakukan proses perencanaan pembangunan, dan dapat memperkaya tulisan dengan topik yang serupa, sehingga pada akhirnya nanti proses perencanaan pembangunan dan penentuan prioritas pembangunan di masing-masing daerah di Indonesia dapat dilakukan dengan metode-metode yang ilmiah dengan melibatkan orang-orang yang benar-benar kompeten di bidangnya.